

MYANMAR DAN MATINYA PENEGAKAN DEMOKRASI

oleh:
Awani Irewati

Abstract

Democratization in Myanmar is the most prevalent issue for international society. The world takes the issue because the country has been for decades under authoritarian regime since military junta takeover the government via coup d'etat. Since 1990 general election which had been won by National League for Democracy (NLD), the Military Junta (Tatmadaw) still ruled the country as a sole authoritarian regime. Transition to democracy which been pledged by the junta has not shown any positive outcome. The paper is sought to answer two questions base on the actual political circumstance in Myanmar: how is the progress of democratic and human rights enforcement that has been pushed by pro-democratic people in Myanmar? The second question will bring our attention to the power of the prolonged military junta in Myanmar. Even though Myanmar has been under economic sanction and isolated from international society, there is no evidence that the military junta will come to an end.

Based on literature study as the main source of data collecting approach, this paper brings forward two conclusions. Those two conclusions emerge from the existing internal and external political condition of Myanmar. Internal political condition shown that ethnical diversity in Myanmar is main obstacle for establishing oppositional coalition against the military junta. Ethnic in Myanmar is separated in factionalized movement against the ruling authoritarian regime since colonial era. It is still complicated until recent time to build a coalition from pro-democratic movement in Myanmar. The second conclusion is coming from the international society in putting more pressure towards the ruling regime. It is good for the UN and the international society not just isolating and sanctioning Myanmar but also approaching Myanmar using the influence of the third country. China is good to become a promoter political reformation in Myanmar since China is the only country that still maintains a close relation with Myanmar. This approach is to give more emphasis for Myanmar government to comply with its own pledge toward democratic transition in its own country.

Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang diajukan Amerika Serikat pada Januari 2007 menggugat Pemerintah Militer Myanmar untuk segera dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Gugatan tentang dihormatinya HAM dan ditegakannya demokrasi dengan segera di dalam negeri Myanmar tampaknya merupakan upaya akhir dari komunitas internasional. Menyandingkan alam demokrasi dengan kekuasaan militer di Myanmar sejauh ini menjadi hal yang mustahil selama sistem pemerintahannya masih dipegang oleh Junta Militer (*Tatmadaw*). Upaya penegakan demokrasi dan nilai-nilai HAM di Myanmar terasa begitu mahal untuk diwujudkan. Tidak saja sulit bagi masyarakat Myanmar sendiri, namun juga bagi negara-negara besar dalam menanti terjadinya reformasi politik. Satu hal penting dan menentukan bagi kemajuan Myanmar di sisi demokrasi dan HAM ini sebenarnya bisa diawali dengan kerelaan pemerintah Junta Militer untuk segera

membebaskan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Tuntutan dan desakan dari masyarakat Myanmar maupun beberapa negara ASEAN bahkan negara-negara besar (terutama Amerika Serikat) agar tokoh demokrasi tersebut segera dibebaskan menjadi semakin kuat.

Ada satu alasan kuat yang melatari mengapa tuntutan bebas itu semakin kuat, yakni bahwa Aung San Suu Kyi, khususnya partai *National League for Democracy* (NLD) dalam Pemilu tahun 1990 sebenarnya telah unggul sebagai pemenang mengalahkan partainya Junta Militer. Kemenangan NLD ini sesungguhnya merupakan refleksi dari keinginan rakyat Myanmar untuk memiliki satu pemerintahan sipil di bawah payung demokrasi seperti negara-negara lain. Namun keinginan rakyat Myanmar yang demikian tampaknya masih jauh dari kenyataan. Kemenangan mereka, kemudian, dibatalkan sepihak oleh pemerintah militer Myanmar. Hasilnya, kekuatan Junta Militer tetap

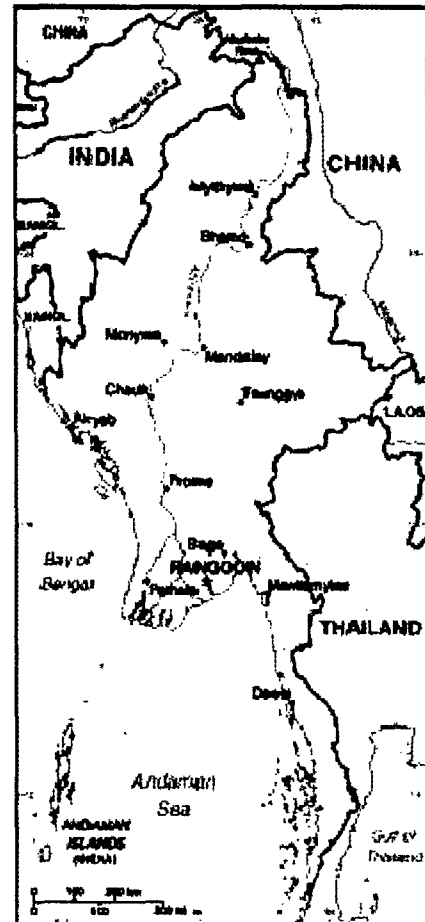
memegang kekuasaan di Myanmar. Sejak itu gerak perjuangan Suu Kyi (ikon demokrasi Myanmar) menjadi terpasung di bawah sejumlah tekanan Junta Militer. Lalu bagaimana penegakan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Myanmar berlangsung? Kekuatan apa yang mendukung pemerintah Junta Militer sehingga dirinya tetap saja masih bisa eksis meski beberapa negara besar memberikan sanksi kepadanya? Dua pertanyaan ini menjadi dasar bagi analisis penulisan ini.

Profil Negeri Myanmar

Myanmar yang memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya (Inggris) pada 4 Januari 1948 adalah sebuah negara yang berlokasi paling ujung barat di wilayah Asia Tenggara. Jika kita melihat gambar pada peta Myanmar terlihat bahwa Myanmar merupakan suatu negara dengan letak geografisnya yang amat strategis. Letaknya berbatasan langsung dengan 5 negara tetangga, yakni dengan Cina di sebelah utara; dengan Laos di sebelah timur; Thailand sebelah tenggara; Bangladesh sebelah barat; dan dengan India di sebelah barat laut. Meski Myanmar dikelilingi oleh 5 negara yang berbatasan langsung dengan dirinya, Myanmar bukanlah negara yang “terkunci” (*land locked state*). Sebelah selatan Myanmar berhadapan dengan Laut Andaman, dan sebelah barat dayanya menghadap ke Teluk Bengal. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan 5 negara ini tentu Myanmar harus membina hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik bisa terbina apabila kondisi politik ekonomi di dalam negeri Myanmar relatif baik dan lebih terbuka. Artinya, apabila Myanmar tidak dihadapkan dengan masalah kehidupan politik dalam negeri seperti sekarang ini —seperti banyak tekanan-tekanan pemerintah Junta Militer kepada kelompok-kelompok etnis Myanmar maupun konflik antaretnis—tentu hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara tetangga akan bisa berjalan dengan lebih terbuka dan maju. Kenyataannya, perhatian Myanmar lebih banyak terpusat ke masalah dalam negeri ketimbang peran aktifnya di luar Myanmar, khususnya di ASEAN.

Dari 5 negara tetangga itu, hubungan Myanmar dengan Cina dinilai paling dekat. Kedekatannya dengan Cina ini lebih didasarkan pada hubungan perdagangan tradisional sejak

zaman dahulu. Perkebunan dan perdagangan opium di Myanmar menjadi faktor pendukung kuat bagi berlangsungnya hubungan bisnis antara mereka. Sementara hubungan Myanmar dengan Thailand (Selatan) lebih banyak diwarnai oleh munculnya masalah pengungsian perbatasan kelompok etnis Myanmar yang menghindari dari pengejaran Junta Militer untuk mencari perlindungan di Thailand Selatan.



Gambar 1. Peta Myanmar

Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/Burma>
diakses pada tgl. 19 Januari 2007, pk. 21.00 WIB

Hingga kini, masalah pengungsian ini masih berlangsung dan ini sebenarnya melatari hubungan antara kedua negara yang kenyataannya kurang begitu baik, karena masalah pengungsian perbatasan ini hampir tidak pernah diselesaikan secara formal antara keduanya. Pihak Junta Militer mengecam negara Thailand yang memberi perlindungan kepada kelompok etnis Myanmar (Mon, Karenni, dan Karen) yang lari ke perbatasan Thailand-Myanmar, sedangkan Thailand menuduh

Myanmar sebagai pihak yang sengaja memicu kerusuhan di perbatasan. Dengan Bangladesh juga tidak lepas dari masalah pengungsian kelompok etnis Rohingya (kelompok Muslim) dari Myanmar. Masalah perbatasan antarnegara menjadi rawan oleh hal-hal yang sifatnya sporadis maupun permanen, seperti masalah penyelundupan dan kriminalitas. Demikian juga dengan India ada permasalahan gerakan separatis India yang berbasis di daerah Sagaing (*Sagaing Division*) di Myanmar yang telah bertahun-tahun melakukan perlawanan ke India.¹

Di bawah kondisi peta geografi Myanmar yang berdekatan dengan negara-negara tetangga di atas secara umum masih menyisakan beberapa masalah yang sesungguhnya dipicu oleh kondisi dalam negeri Myanmar sendiri. Pergolakan antara Junta Militer dan sejumlah kelompok etnis Myanmar banyak menyita perhatian Myanmar sendiri sehingga tak pelak menghambat kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Myanmar dahulu dikenal bernama Burma dengan ibu kotanya adalah Yangon (Rangoon) namun kemudian Ibu Kota Myanmar dipindahkan ke Pyinmana. Sistem pemerintahan Myanmar di bawah Junta Militer dengan dua kendali, yakni Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (*State Peace and Development Council/SPDC*) yang dipegang oleh Jenderal Besar (*Senior General*) Than Shwe dan seorang Perdana Menteri bernama Letnan Jenderal (*Lieutenant General*) Soe Win. Meski Myanmar memiliki seorang perdana menteri, dalam praktiknya semua kehidupan bernegara berada di bawah kendali satu tangan Than Shwe. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, otomatis tak ada satu pun kekuatan oposisi yang eksis berhadapan dengan kekuatan pemerintah seperti Junta Militer ini.

Myanmar memiliki luas wilayah 678.500 km² dengan area perairannya hanya 3,06% (wilayah pesisir selatan yang berhadapan dengan Laut Andaman dan barat daya dengan Teluk Bengal). Jumlah penduduknya, berdasarkan perhitungan tahun 2004 adalah sebesar 54 juta.²

¹ Bisa lihat lebih jauh pada "Burma to fight India militants" pada http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6364735.stm, diakses pada tgl. 21 Februari 2007.

² <http://en.wikipedia.org/wiki/Burma>. Jumlah kelompok etnis Myanmar sebenarnya tidak hanya apa yang tertulis di atas. Masih ada kelompok-kelompok etnis lainnya namun dengan jumlah yang kecil, yakni Akha, Danu, Karenni, Kayan, Kokang, Lahu, Naga, Palaung, Pao, Tavoyan, Wa.

Populasi ini terdiri dari sejumlah kelompok etnis yang berbeda-beda, baik dalam bahasa, agama, maupun mobilitas sosialnya. Sejumlah kelompok etnis itu adalah Bamar (merupakan kelompok etnis dominan) dengan bahasa Burmese sebagai bahasa sehari-hari; Shan (berjumlah 10%) yang berbahasa dialek Shan yang memiliki kemiripan dengan bahasa Laos dan Thailand; Kayin (Karen) sekitar 7% memiliki kemiripan bahasa dengan bahasa yang digunakan kelompok Bamar; lalu Rakhine; Kachin; Chin; Chinese; Mon; Indian. Selain kelompok-kelompok etnis tersebut ada kelompok lain yang merupakan campuran dari *Burmese – Eurasian*. Namun kelompok ini sejak terjadinya kup militer di Myanmar tahun 1962 telah meninggalkan negeri Myanmar, sedangkan mereka yang tinggal kebanyakan berasimilasi dengan kelompok Bamar maupun Indian.

Penduduk Myanmar kebanyakan beragama Budha Theravada terutama dianut oleh kelompok-kelompok Bamar, Rakhine, Shan, Mon, Chinese. Hanya Chin dan Kayin yang beragama Kristen, dan Rohingya beragama Islam, dan hanya dalam jumlah kecil saja yang beragama Hindu ataupun animisme.

Mata uang yang digunakan di Myanmar adalah Kyat. Perekonomian Myanmar tampak kurang maju dengan tingkat inflasinya terbilang ketiga tertinggi di dunia, yakni sekitar 15–17 % per tahun.³ Kegiatan ekspor dan impor berlangsung di bawah pengendalian kontrol kuat dari Junta Militer. Bisa ditebak kegiatan perdagangan internasional Myanmar berada pada tingkat yang rendah, dan sebagai konsekuensi dari tingkat perdagangan internasional yang begitu dibatasi, masukan bagi devisa negara amat terbatas. Dengan cadangan devisa yang begitu terbatas tentu akan sangat mempengaruhi dinamika ekspor dan impor Myanmar. Lalu mengapa pemerintah terkesan

³ Tingkat inflasi yang tinggi itu seperti yang dikemukakan oleh seorang pengamat politik Myanmar dari Selandia Baru, Alfred Oehlers dalam seminar sehari "Recent Developments in Burma", CSIS, Jakarta 20 Juli 2005. Diakuinya bahwa persentase tersebut diperoleh dari upaya surveinya yang dilakukan secara cepat (*quick survey*) terhadap 3 bank yang beroperasi di Myanmar. Survei secara cepat itu terpaksa dilakukan mengingat begitu sulit untuk memperoleh data secara leluasa di Myanmar karena semua informasi yang disediakan pemerintah amat sulit sekali diakses. Meski dilakukan secara cepat namun sebagaimana diakuinya, informasi yang diperoleh tersebut dilakukan dengan tingkat komprehensif yang cukup tinggi.

begitu amat membatasi kegiatan perdagangan internasionalnya itu? Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya sikap dari pemerintahan militer yang terkesan lebih mengutamakan urusan politik semata daripada urusan kemajuan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu, pemberlakuan sanksi ekonomi, seperti larangan melakukan transaksi ekonomi dengan hampir semua bentuk asosiasi dagang Myanmar oleh Amerika menyebabkan semakin sempitnya peluang bagi kegiatan ekonomi Myanmar dalam bertransaksi dengan kegiatan ekonomi internasional. Ini tentunya amat berpengaruh kepada tingkat pemasukan cadangan devisa ke Myanmar.

Myanmar adalah sebuah negara Asia yang sebenarnya menyimpan sejumlah kekayaan alam yang tidak kalah pentingnya dibandingkan negara-negara lain. Jika saja pemerintah Myanmar bisa sedikit memberi keleluasaan kepada sektor swastanya untuk berperan aktif dalam perekonomian dalam negeri, mungkin kondisi kehidupan ekonomi domestik Myanmar tidak akan terpuruk seperti saat ini. Lalu apa yang menyebabkan Myanmar bisa bertahan sejauh ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini, amat penting untuk menengok sejenak bagaimana kehidupan politik di dalam Myanmar sendiri.

Perjuangan Mencapai Kemerdekaan

Ketika Burma masih berada di bawah kuasa pendudukan Inggris, keinginan puncak rakyat Burma untuk segera memperoleh kemerdekaan sudah tidak bisa dipatahkan. Adalah seorang pejuang kemerdekaan bernama Aung San (ayah dari Aung San Suu Kyi) yang kemudian memulai perjuangan nasionalnya itu dengan cara menciptakan satu partai politik bernama *Anti-Fascist People's Burmese Forces* (AFPBF).⁴ Partai ini awalnya hanya sebuah organisasi Anti-Fasis (*Anti-Fascist Organization/AFO*) yang berjuang menolak segala bentuk fasisme dari kekuatan asing. Namun dalam perkembangannya kemudian, Aung San melihat perjuangan lewat organisasi ini dirasakan kurang memiliki

daya tekan maksimal bagi perjuangan ke arah pembebasan. Pada pertengahan tahun 1945, Aung San mengubah organisasinya ini menjadi partai politik dengan harapan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan lewat sebuah partai dapat segera terwujud.

Perjuangan Aung San ini sebenarnya tidak baru dimulai lewat pembentukan partai tersebut. Jauh sebelumnya, ketika Perang Dunia II dimulai, dia sebagai seorang nasionalis bersama dengan yang lainnya sudah menggalang kekuatan melawan penjajahan Inggris di bumi Burma. Akan tetapi, perjuangannya ini segera tercium oleh Pemerintah Kolonial Inggris, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap pejuang-pejuang nasional lainnya. Jepang melihat perjuangan mereka ini memerlukan bantuan. Karena itu, Jepang segera memberi dukungan kepada mereka dengan langsung mendeklarasikan kemerdekaan Burma pada Desember 1941. Namun, sejatinya kemerdekaan yang diinginkan itu belum diperoleh Burma. Ini hanya sebagai taktik Jepang mencari muka pada Burma. Awalnya Aung San bergabung dengan satu organisasi bernama *Dohbama Asi-ayone Organization* ("We Burmese"), yang jika mencermati arti dari organisasi tersebut menunjuk pada satu upaya untuk menyamakan langkah dan visi dari para nasionalis Burma. Tidak berhenti sampai di situ, akhir tahun 1941 Aung San kemudian membentuk *Burmese Independence Army* (BIA), yang mana pembentukan ini merupakan cara perlawanan yang lebih frontal untuk mencapai kemerdekaan daripada sebelumnya.⁵ Tentara Kemerdekaan Burma ini mendapat dukungan dan latihan militer dari Jepang. Dukungan dari Jepang ini bisa diperoleh dengan mudah lantaran antara kebutuhan Burma lewat perantara Aung San dan kebutuhan Jepang bisa "dipersatukan" untuk menghadapi Inggris.

Ketika ibu kota Burma, Rangoon, jatuh ke tangan Jepang pada Maret 1942, Aung San dan kelompoknya tidak berusaha menampakkan satu perlawanan kuat terhadap Jepang. Apa yang dilakukan Aung San dengan mengganti *Burmese Independence Army* menjadi *Burma Defence Army* (BDA) tahun 1942 bisa dimaknai sebagai wujud sikapnya yang merasa lebih "aman" berada di bawah pendudukan Jepang daripada

⁴ Bisa juga lihat pada tulisan Jopkie Kurniawan dan Awani Irewati, "Perjuangan Kehidupan Demokrasi di Negara Myanmar" pada penelitian *Problematisasi Myanmar dalam ASEAN*, Jakarta: the Habibie Center, 2006, hlm. 10—13.

⁵ http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aung_San

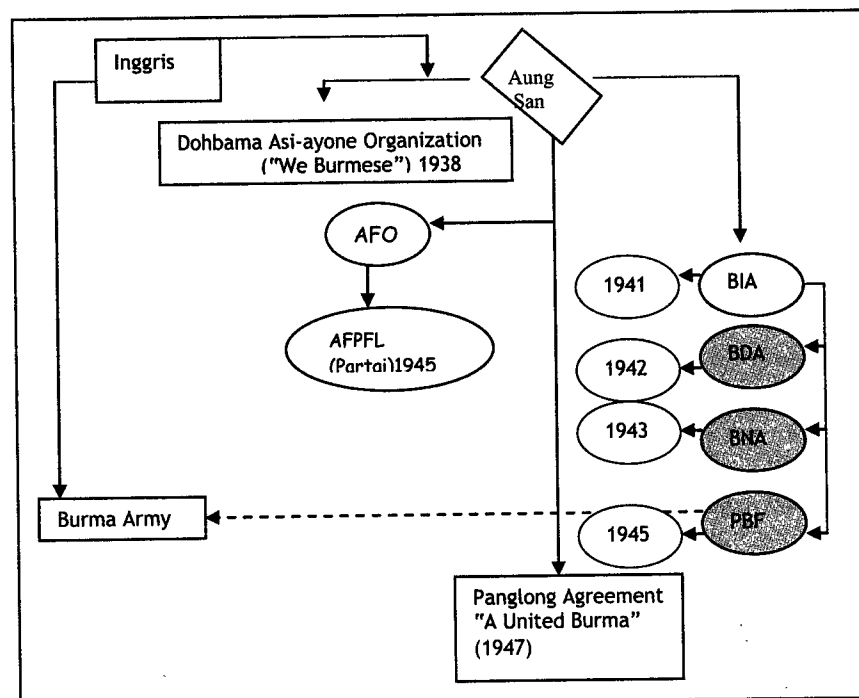
Inggris. Jumlah anggota BDA dari waktu ke waktu semakin bertambah.⁶ Ini merefleksikan semakin besarnya harapan rakyat Burma untuk dapat segera mencapai kemerdekaan. Tahun 1943 BDA diubah namanya menjadi *Burma National Army* (BNA). Meski perubahan nama ini terkesan lebih nasionalis daripada sebelumnya, sesungguhnya upaya ini belum mendatangkan hasil positif. Janji kemerdekaan di bawah penjajahan Jepang ternyata hanya sebagai isapan jempol saja.

Segala upaya dilakukan termasuk memanfaatkan keinginan Inggris untuk mengusir Jepang dari Burma. Pada akhirnya keinginan Burma itu terwujud lewat bantuan Inggris mengusir Jepang dari Burma pada Mei 1945,⁷ meski pada akhirnya Inggris menguasai kembali tanah jajahan Burma.

Upaya Aung San masih terus berlanjut. Dia mengubah wujud BNA menjadi *Patriotic Burmese Forces* (PBF), yang bisa dimaknai

sebagai upaya kembalinya semangat perjuangan untuk membersihkan bumi Burma dari pendudukan asing. Namun perubahan ini tidak diakui juga oleh Inggris, sebaliknya Inggris justru menawarkan kekuatan baru ini untuk bergabung ke dalam *Burma Army* yang berada di bawah kontrol langsung Inggris. Penawaran ini langsung ditolak Aung San, yang sejatinya memang sangat tidak menyukai penjajahan Inggris. Pada 27 Januari 1947 antara Burma yang diwakili oleh Aung San dan Inggris yang diwakili oleh Clement Attlee menandatangani satu perjanjian yang berisikan adanya jaminan pemberian kemerdekaan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

Kemerdekaan Burma seharusnya bisa diperjuangkan secara lebih cepat jika kelompok-kelompok di dalam negerinya bisa dipersatukan. Lalu mengapa persatuan antarkelompok terkesan sulit diwujudkan?



Gambar 2. Skema Perjuangan Politik Burma

Sumber: skema diolah oleh penulis pribadi berdasarkan isi tulisan.⁸

⁶ Jopkie Kurniawan dan Awani Irewati, *op.cit.*, hlm. 9, yang juga mencantumkan keterangan sumbernya pada <http://www.en.wikipedia.org> lalu masuk ke seksi "Perjuangan Nasionalis Burma", <http://www.historyofnations.net/asia.birma.html> diakses tgl. 19 Januari 2007.

⁷ <http://www.en.wikipedia.org>

⁸ Keterangan: pada 1938 Aung San bergabung dengan *Dohbama Asi-ayone organization* sebagai langkah awal perjuangan. *Burmese Independence Army* (BIA)

sebenarnya dibentuk di Bangkok-Thailand dengan bantuan Jepang pada Desember 1941. Ketika Burma jatuh ke tangan Jepang 1942, BIA diubah menjadi *Burma Defence Army* (BDA). Ketika Jepang mendeklarasikan Burma sebagai negara merdeka pada 1 Agustus 1943, Aung San ditunjuk sebagai Menteri Perang. Aung San bersama nasionalis lainnya kemudian membentuk *Anti-Fascist Organization* (AFO) pada Agustus 1943. Pada November 1943 ia kembali berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang

Pergolakan antar-Kelompok Etnis

Perjuangan Burma untuk mencapai kebebasan dari pendudukan Inggris masih bertele-tele selama kondisi dalam negerinya belum bebas dari sejumlah konflik antar-kelompok etnis. Konflik-konflik ini sebenarnya telah lama terjadi sebelum pasukan Inggris mendarat di tanah Burma. Ketika Inggris maupun Jepang menduduki Burma secara bergantian, intensitas konflik antar-kelompok etnis ini justru sedikit mereda, meski tidak semua konflik berakhir.⁹ Meredanya intensitas konflik ini bukan karena telah diselesaikannya konflik-konflik yang terjadi, melainkan karena perhatian pihak-pihak yang berkonflik menjadi “terserap” kepada dua kepentingan kekuasaan asing tersebut. Ketika itu banyak etnis Burman (sebagai etnis mayoritas) yang bekerja sama dengan Jepang untuk melawan kekuatan Inggris. Akan tetapi, banyak juga kelompok minoritas etnis yang justru bekerja sama dengan Inggris. Tiadanya rasa persatuan dari semua kelompok etnis di Burma merupakan kesempatan emas bagi kekuatan-kekuatan asing untuk mengambil keuntungan dalam situasi negeri Burma yang terpecah.

Sebaliknya, kelompok-kelompok yang bertikai ini seperti etnis minoritas lainnya justru ingin lepas dari dominasi etnis Burman. Sementara itu, bagi etnis Burman sendiri yang bekerja sama dengan Jepang memilih cara ini hanya sebagai upaya untuk mendepak kekuatan Inggris semata. Di bawah kondisi yang demikian, masih sulit bagi Burma untuk mencapai

tidak kunjung terwujud sebagaimana janji Jepang. Ia memperbarui BDA menjadi *Burma National Army* (BNA). Namun ketika Jepang diserang AS dan sekutunya, BNA ikut melakukan penyerangan ke Jepang bersama dengan Inggris pada 27 Maret 1945. Setelah melakukan penyerangan itu, Aung San mengubah AFO menjadi partai *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) tahun 1945 agar lebih menggarangkan upaya perjuangan melawan penjajahan yang masih ada, yakni Inggris. Saat itu juga BNA diubah menjadi *Patriotic Burmese Forces* (PBF), akhirnya dilucuti Inggris. Sebagai gantinya PBF ditawarkan Inggris untuk lebur di bawah *Burma Army*, yang berada di bawah komando Inggris. Aung San ditawarkan satu posisi sebagai deputi inspektur jenderal di dalamnya, namun ditolaknya. Januari 1946 Aung San menjadi Presiden AFPFL dan mewujudkan *Panglong Agreement* guna mendorong semangat rakyat Burma Bersatu pada Januari 1947, selanjutnya ia juga mengikuti konferensi-konferensi guna mencari metode rehabilitasi Burma

⁹ “Country in Crises-Ethnic Groups” pada <http://www2.soros.org/burma/CRISIS/ethnic.html>

kemerdekaan yang seutuhnya diperjuangkan oleh seluruh kelompok Burma yang bersatu. Jika pada akhirnya Burma memperoleh kemerdekaan, itu sebagai upaya gigih dari kelompok tertentu yang terus-menerus mendekati pihak Inggris.

Kelemahan dalam negeri Burma ini bukannya tidak disadari oleh tokoh nasionalis seperti Aung San. Oleh karena itu, ia mengeluarkan inisiatif berupa perlunya dibuat satu perjanjian bernama *Panglong Agreement*, yang isinya mewujudkan satu ikatan Burma yang kukuh (*a United Burma*) pada Januari 1947. Usaha ini tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Sejumlah pertemuan dilaksanakan guna mematangkan konsep dan tujuan dari ide *A United Burma* ini. Sayangnya upaya yang dilakukan oleh Aung San ini belum mencapai titik terang dalam realisasinya, karena peta politik dalam negeri Burma yang masih terpecah belah membuat upaya ke arah itu terasa amat sulit diwujudkan. Perjuangan Aung San terpenggal ketika ia bersama enam anggota dewan lainnya tewas terbunuh ketika sedang menghadiri pertemuan dewan eksekutif. Pembunuhan Aung San dan anggota lainnya yang terjadi pada 19 Juli 1947 itu disinyalir dilakukan oleh rival politiknya, yakni U Saw. Meski U Saw akhirnya menjadi terdakwa dan dieksekusi mati, masih tidak jelas juga siapa sebenarnya otak di balik tewasnya Aung San. Tabir persaingan politik tampaknya mulai terjadi di samping pergolakan antara kelompok etnis mayoritas dan etnis minoritas masih tetap berlangsung.

Kekuasaan Militer dan Matinya Demokrasi

Burma akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama resmi *Union of Burma*. U Nu adalah Perdana Menteri Burma yang pertama yang memimpin dan menjalankan pemerintahan Burma selama delapan tahun. U Nu adalah seorang nasionalis yang pernah diusir pemerintah Inggris dan dipaksa berhenti studi dari Fakultas Hukum Universitas Rangoon tahun 1936 karena kegiatan politiknya saat itu.¹⁰ Ia

¹⁰ “U Nu, ‘Senjata Bukan Penyelesaian Masalah’”, *Pikiran Rakyat*, 19 April 2005. U Nu adalah seorang perdana menteri yang berasal dari kelompok sipil yakni dari Partai *Anti-Fascist People's Freedom League*. “Prime Minister of Myanmar” pada http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Myanmar, diakses pada Agustus 2005.

menjadi perdana menteri selama delapan tahun dan mengundurkan diri tahun 1956 dan empat tahun kemudian terpilih kembali, meski pada akhirnya dipaksa mundur dan ditahan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962. Sejak saat itu pemerintahan militer di bawah Ne Win mulai berkuasa dan memegang tampuk kekuasaan di Burma hingga 1988.

Aksi penggulingan ini mungkin tidak sulit dilakukan oleh kelompok militer terhadap seorang pemimpin yang berasal dari kalangan sipil (seperti U Nu). Akan tetapi, sedemikian mudahnya kelompok ini “mengambil alih” kekuasaan tanpa sedikit pun melibatkan proses demokrasi di dalamnya melahirkan dan membentuk pola kekuasaan yang bersifat tirani. Apa yang diinginkan oleh Pemerintah Junta Militer sesungguhnya mengarahkan Burma untuk menjadi negara sosialis, dengan melakukan pembaharuan pada semua sisi perekonomian rakyat yang dinasionalisasikan.¹¹

Untuk tujuan itu, sistem satu partai politik diciptakan dengan nama *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) yang kemudian berkuasa selama 26 tahun. Dengan berlangsungnya pemerintahan satu partai ini, hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi, serta kebebasan berorganisasi tidak diberikan.¹² Di bawah program nasionalisasi, semua aset perdagangan dan industri ternyata tidak mampu mendorong dinamika sektor industri yang diharapkan bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara normal. Sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Junta Militer ini ternyata tidak disesuaikan dengan kondisi Burma yang sedari dulu sudah unggul di sektor pertanian. Kondisi perekonomian saat itu semakin tidak menentu. Januari 1974 Junta Militer mengeluarkan konstitusi baru dengan melebur 3 lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi satu di bawah *People's Assembly*. Peleburan ini mendapat perlawanan dari rakyat yang kemudian melakukan demonstrasi menentang kebijakan itu. Di mata rakyat peleburan ini dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan Junta Militer terhadap kebebasan lembaga sipil serta

penghapusan hak-hak sipil di dalam roda pemerintah.

Pada tahun 1988 terjadi suatu pemberontakan yang dipimpin oleh para biksu dan mahasiswa yang memaksa sekelompok jenderal untuk menggulingkan Jenderal Ne Win.¹³ Jenderal Saw Maung, yang diangkat menjadi panglima militer (*Tatmadaw*) oleh Ne Win pada 1985, ditunjuk sebagai pengganti Ne Win. Di bawah Jenderal Saw Maung kondisi perekonomian sebenarnya mulai membaik.¹⁴ Perubahan ekonomi Burma ini didukung pula oleh sikap Saw Maung yang lebih terbuka terhadap bantuan asing. Pengurangan kontrol serta dorongan masuknya investasi asing mulai dijalankan sebagai upaya reformasi di bidang ekonomi.

Akan tetapi, upaya pembenahan yang memang belum mampu menghasilkan perbaikan ekonomi secara pesat ini dirasakan oleh rakyat Burma sebagai upaya tak berwujud. Ketidakpuasan muncul dalam bentuk demonstrasi terhadap pemerintah. Demonstrasi ini akhirnya memicu pertumpahan darah pada 8 Agustus 1988, yang dikenal dengan kejadian “*the 8888 uprising*”. Dari peristiwa itu, pemerintah militer kemudian membentuk Dewan Restorasi Peraturan dan Hukum Negara (*the State Law and Order Restoration Council/ SLORC*), dengan Jenderal Than Shwe sebagai salah satu anggotanya. Dewan diubah namanya menjadi Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (*State Peace and Development Council/ SPDC*) tahun 1997. Pengubahan nama ini kenyataannya tidak banyak memberi makna perubahan pada reformasi politik.

Hingga akhir 1980-an perekonomian Burma belum menghasilkan kemajuan berarti sebagaimana yang diinginkan ketika Saw Maung

¹¹ <http://www.en.wikipedia.org>, lalu buka <http://www.historyofnations.net/asia/birma.html>, diakses pada Agustus 2005.

¹² “Country in Crises-History”, <http://www.2.soros.org/burma/CRISIS/democ.html>, diakses pada Agustus 2005.

¹³ Dikemukakan oleh CPF. Luhulima dalam makalah tanggapan atas studi “Isu Kepemimpinan Myanmar dalam ASEAN” di The Habibie Center, Jakarta, 5 Maret 2005. Tahun 1988, pemberontakan yang dipimpin oleh para biksu dan mahasiswa memaksa sekelompok jenderal untuk menyingkirkan Jenderal Ne Win dan mengadakan pemilihan umum. Kelompok jenderal ini menginstruksikan Jenderal Saw Maung (yang tahun 1985 diangkat menjadi panglima *Tatmadaw*) untuk meluncurkan *coup d'etat*. Data diambil juga dari Min Zin, “*Sorting the Tatmadaw after Ne Win*”, The Irrawaddy, Vol. 11. No. 1, Januari-Februari 2003, <http://www.irrawaddy.org/database/2003/vol.11.1/c-sorting.html>, diakses 7 Februari 2006. Informasi ini dikutip dari makalah pembahas CPF Luhulima, yang khusus memberi tanggapan pada penelitian tersebut.

¹⁴ <http://www.historyofnations.net/asia/birma.html>

mulai menatanya. Harga komoditas yang begitu rendah dan utang-utang luar negeri yang meningkat membuat Burma tidak bisa menghindari dari krisis ekonomi. Pada saat bersamaan, nama Burma diubah menjadi Myanmar dengan maksud bisa memberikan kesan pada dunia bahwa negeri Myanmar ingin memulai kehidupan bernegaranya dengan sesuatu yang baru dan bersih. Dengan kata lain, pemerintah akan melanjutkan reformasi ekonomi serta akan melakukan perubahan konstitusi 1974 dengan rencana mengadakan pemilihan umum berdasar sistem multipartai pada tahun 1990.

a. Kemenangan Lawan yang Tak Diakui

Untuk pertama kali pemilihan umum dilangsungkan pada 27 Mei 1990 setelah hampir 30 tahun sebelumnya Myanmar tak pernah melakukan itu. Pemilu ini sebenarnya sebagai ajang “*test case*” bagi Junta Militer atas bagaimana sikap rakyat sesungguhnya kepada kepemimpinan mereka. Ternyata hasil pemilu dimenangkan secara mutlak oleh Partai Liga Nasional Demokrasi (*National League for Democracy/NLD*) Pimpinan Aung San Suu Kyi dengan jumlah 392 kursi. Sedangkan partainya Junta Militer, Partai Kesatuan Nasional (*National Unity Party/NUP*) kelanjutan dari BSPP hanya memenangkan 10 kursi saja di Parlemen¹⁵ dan partai-partai dari kelompok minoritas etnis secara keseluruhan memperoleh 60 kursi.¹⁶ Kemenangan mutlak bagi NLD ini mengindikasikan sebegitu besarnya keinginan para konstituen untuk menghirup alam perubahan dan kebebasan demokrasi seperti negara-negara lain. Bisa dipahami keinginan mereka yang demikian, karena siapa pun mereka akan merindukan kebebasan sipil sesuai dengan naluri manusia.

Sayangnya, kemenangan mutlak dari NLD tidak diakui oleh pemerintah yang mana dengan cepat memberi justifikasi bagi tujuan pemilu yang diselenggarakan itu hanya sebagai ajang perolehan suara untuk menyetujui pembuatan konstitusi baru, bukan ajang kemenangan untuk pemilihan parlemen. Sejak saat itu, perlakuan Junta Militer kepada masyarakat sipil semakin

membatasi aktivitas-aktivitas politik serta menangkap orang-orang yang dianggap “mengancam” eksistensi pemerintah militer, seperti U Tin U dan Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi yang merupakan anak dari tokoh nasionalis Aung San zaman pendudukan Inggris, menjadi ikon demokrasi di Myanmar dengan para pengikutnya yang begitu banyak. Dia memenangkan *Sakharov Prize* pada tahun 1990 serta memperoleh *Nobel Peace Prize* pada 1992. Dua penghargaan semacam ini bukan tujuan akhir Suu Kyi, melainkan semakin menguatkan konsistensinya untuk bertahan pada perjuangan demokrasi di dalam Myanmar. Suu Kyi menjalani tahanan rumah untuk pertama kalinya tahun 1989.

Sampai di sini, ada satu hal yang bisa dipelajari dari peristiwa pembungkaman demokrasi di Myanmar ini, yakni perjalanan Myanmar hingga Pemilu 1990 itu bagai menyimpan “bom waktu”. Pemicunya amat jelas, yakni kekecewaan rakyat pada hasil pemilu yang dibatalkan secara sepihak oleh pemerintahan militer. Sebaliknya, kemenangan Aung San Suu Kyi ini justru mendapat simpati yang tinggi dari dunia internasional.¹⁷ Penahanan Suu Kyi masih berlanjut meski Jenderal Saw Maung tidak berkuasa lagi. Pengganti Jenderal Saw Maung adalah Jenderal Than Shwe pada 23 April 1992.¹⁸ Hingga kini Myanmar masih

¹⁷ Begitu ketat dan kerasnya kontrol dari Pemerintahan Militer Myanmar atas warganya yang tak memiliki celah sedikit pun untuk memperjuangkan kebebasan, banyak dari mereka yang telah meninggalkan negerinya justru tetap berjuang di tempat barunya. Salah satunya adalah *National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB)* yang diketuai oleh Sein Win dan bertempat di Rockvill, Maryland, AS. NCGUB bersama dengan NLD (di bawah Aung San Suu Kyi) menyatakan diri mereka sebagai partai-partai oposisi terhadap partai berkuasa (milik Junta Militer) yakni *National Unity Party (NUP)*. Di samping itu, ada partai-partai kecil dari kelompok-kelompok etnis minoritas (non-Etnis Burman) yang juga begitu perhatian untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yakni Liga Nasionalis Bersatu untuk Demokrasi (*United Nationalities League for Democracy/UNLD*) dan Front Demokrasi Nasional (*National Democratic Front/NDF*) yang merupakan koalisi dari kelompok-kelompok etnis lainnya. Kekuatan-kekuatan oposisi pro-demokrasi seperti di atas akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan yang berkuasa di masa depan. Dan ini sangat disadari oleh pemerintahan militer sehingga tak heran jika tokoh demokrasi seperti Aung San Suu Kyi menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah. *Ibid.*

¹⁸ Sebenarnya pengunduran diri Jenderal Saw Maung dengan alasan kesehatan hanyalah pernyataan resmi dari pemerintah. Namun, ia sesungguhnya disingkirkan oleh Ne Win yang secara *de facto* meski tidak duduk di tampuk pemerintahan masih memegang kendali di belakang layar. Ne Win saat itu memerintahkan Jenderal Than Shwe, Khin Nyunt dan Myo Nyunt untuk menyingkirkan Jenderal Saw Maung.

¹⁵ Diakses dari <http://www.en.wikipedia.org>, yang telah dikutip dalam Jopkie Kurniawan dan Awani Irewati, *op.cit.* hlm. 14.

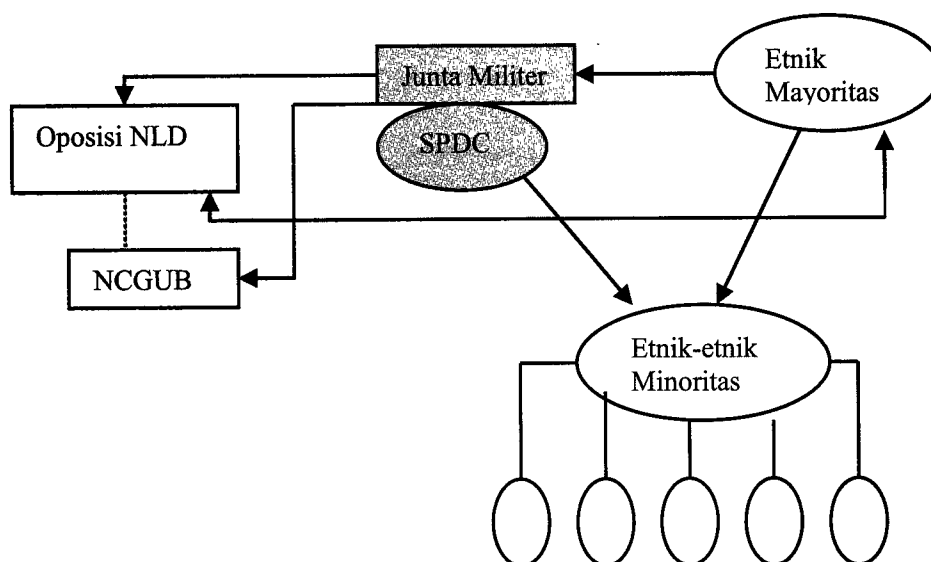
¹⁶ *Ibid.*

berada di bawah kepemimpinan Than Shwe, baik sebagai kepala negara; pimpinan dewan (SLORC) maupun sebagai *commander-in-chief of the armed forces*.

Jenderal Than Shwe pernah membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah pada Juli 1995. Namun di balik pemberian pembebasan itu tampaknya ada rencana lain dari Than Shwe untuk memberikan tawaran pada Suu Kyi untuk ke luar dari Myanmar menuju ke Inggris (bergabung dengan suami dan anak-anaknya). Siasat Than Shwe ini mungkin tercium oleh Suu Kyi yang memperhitungkan jika sekali saja dirinya pergi meninggalkan Myanmar, akan selamanya dia tidak akan bisa kembali lagi ke Myanmar. Ternyata Suu Kyi memilih untuk tetap bertahan di negaranya sendiri sampai terdapat pencerahan demokrasi. Konsekuensinya, Suu Kyi ditangkap kembali pada September 2000 meski dua tahun kemudian ia dibebaskan

kembali. Ketika Suu Kyi dan pengikutnya sedang melakukan perjalanan konvoi ke Depayin, secara tiba-tiba kelompok pasukan bersenjata menyerang kelompok Suu Kyi yang mengakibatkan banyaknya korban yang tewas saat itu. Peristiwa itu dikenal dengan “*Depayin Massacre*” pada 30 Mei 2003. Sejak peristiwa penyerangan itu, Suu Kyi ditangkap dan menjadi tahanan rumah kembali hingga sekarang.

Yang membuat Aung San Suu Kyi bertahan keras pada keyakinannya adalah karena pengaruh kelompok intelektual (sarjana dan pengarang) di dalam NLD. Sementara pengaruh dari kelompok mantan komandan militer yang juga ada dalam tubuh NLD tampaknya kurang menonjol, meski kelompok ini memiliki pengalaman politik yang lebih matang. Amat disadari oleh NLD bahwa dirinya banyak mendapat dukungan internasional dan dukungan inilah yang membuatnya merasa yakin betul bisa



Gambar 3. Skema Peta Politik Myanmar Saat Ini

Sumber: laporan penelitian “Problematika Myanmar dalam ASEAN”, penelitian The Habibie Center, yang ditulis oleh Awani Irewati, Ratna Shofi Inayati, Jopkie Kurniawan, 2005.¹⁹

¹⁹ Keterangan: Junta Militer (JM) di bawah kendali Jenderal Than Shwe adalah pemegang kekuasaan di Myanmar. SPDC (State Peace and Development Council) adalah nama pemerintahan dengan Perdana Menteri Soe Win, meski secara riil tenggelam di bawah kekuasaan JM. Dalam kenyataannya tidak hanya “berhadapan” dengan *National League for Democracy* (NLD) sebagai kekuatan oposisi di bawah Aung San Suu Kyi, namun juga dengan sejumlah kelompok minoritas, dengan *National Coalition Government of the Union of Burma* (NCGUB) yang merupakan kekuatan koalisi yang berada di luar negara Myanmar (dengan markasnya di Rockvill, Maryland, AS). Kelompok mayoritas (Burman) banyak yang menduduki posisi di JM. Kelompok mayoritas ini juga “berhadapan” dengan kelompok minoritas. Anggota Oposisi NLD juga banyak yang berasal dari kelompok mayoritas (yang juga mantan militer), sementara NLD juga memiliki kepentingan paralel dalam hal perjuangan dengan kelompok minoritas.

menguatkan *leverage* NLD di mata Junta Militer.²⁰ Akan tetapi, beberapa pengamat menyarankan Aung San Suu Kyi sebaiknya tidak menjadikan dukungan internasional ini sebagai kekuatan dasar bagi perjuangannya, melainkan dengan menurunkan tawarannya kepada Junta Militer mungkin akan bisa melahirkan harapan dan kemajuan baru bagi perwujudan demokrasi. Hal ini mungkin bisa saja berhasil, tetapi mungkin juga tidak. Skema 2 di atas sekadar menjelaskan bagaimana peta politik di Myanmar saat ini beserta dominasi Junta Militer terhadap kelompok-kelompok minoritas etnis, maupun ke NLD dan kekuatan perlawanan di luar Myanmar.

b. Kelompok Etnis Minoritas versus Tatmadaw

Apa yang dihadapi oleh negeri Myanmar ternyata tidak saja persaingan politik antara Junta Militer dan kelompok penegak demokrasi, seperti NLD milik Aung San Suu Kyi saja, tetapi tekanan Junta Militer pada kelompok-kelompok etnis minoritas sangat mengancam kehidupan sosial Myanmar. Junta militer tetap melakukan tekanan-tekanan serta penangkapan bahkan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap melawan kepentingan pemerintahan militer. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand. Sebagai contohnya, banyak kelompok Muslim dari etnis Rohingya di sebelah tenggara Myanmar menempuh perjalanan panjang menuju Bangladesh guna menghindari pengejaran junta. Bahkan etnis Mon, Karenni, dan Karen dari Myanmar timur telah lebih dari

140.000 orang yang mengungsi ke Thailand ketika terjadi serangan militer Burma sejak 1984.²¹

Tidak sedikit pula masyarakat desa terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman mereka (*Internally Displaced Persons*) guna menghindari dari ajakan paksa Junta Militer untuk dijadikan porter militer ataupun pekerja-pekerja paksa pada lahan “bisnis” opium junta. Jumlah mereka ini sekitar 600.000 orang dan tidak menetap di satu lokasi.²² Kehidupan dan kondisi mereka yang selalu berada di bawah kondisi yang mencekam ini biasanya jauh lebih buruk daripada kondisi pengungsi yang lari ke perbatasan dengan negara-negara tetangga yang sering kali masih memperoleh bantuan sosial dari negara bersangkutan.

Di balik tekanan itu, ada beberapa kelompok etnis minoritas yang justru rela melakukan “kerja sama” dengan Junta Militer, yakni etnis Wa dan Kokang sebagai cara agar selamat dari kejaran mereka. Kelompok-kelompok etnis ini telah melakukan perjanjian dengan junta, yang intinya mereka ini diberi “izin” untuk mengelola ladang pertanian opium yang amat menguntungkan secara finansial. Tentu ini dilakukan di bawah “perlindungan” Junta Militer. Keuntungan dari hasil penjualan opium inilah yang menjadi target bagi kepentingan Junta Militer.

Demikian pula dengan suku-suku minoritas lainnya, junta “memburu” mereka yang tinggal di sepanjang perbatasan utara, seperti suku Bukit Cina (*Chinese Hill Tribe*) dan suku Khacin. Tahun 1995 akhirnya perjanjian damai bisa dibuat antara mereka²³. Yang paling “menguntungkan” junta sebenarnya ketika mereka bisa bekerja sama dengan panglima perang Khun Sa yang merupakan seorang pemimpin bandar opium terbesar di sebagian besar wilayah Shan. Khun Sa ini sebenarnya menjadi target penangkapan oleh pemerintah Amerika Serikat karena sindikasinya yang mampu menyuplai dua pertiga kebutuhan Heroin dunia saat itu. Saat ini, peran Khun Sa dalam bisnis ilegal maupun legal masih terus berjalan di bawah perlindungan penguasa Myanmar. Dia menjalankan saham dalam sektor perhotelan dan transportasi publik di wilayah ibu kota.²⁴ Untuk

²⁰ CPF. Luhulima, makalah tanggapan atas studi “Isu Kepemimpinan Myanmar dalam ASEAN”, di The Habibie Center, Jakarta, 05 Maret 2006, menjelaskan dalam kutipan langsung tentang kesimpulan pandangan dari *The Free Burman Coalition* “NLD General Secretary Aung San Suu Kyi remains massively popular, both at home and abroad. However, that popularity has not helped much in her protracted struggle to bring about change her way. The central paradox of the NLD is that Aung San Suu Kyi is both the party's greatest asset and its greatest liability” (“Common Problems, Shared Responsibilities: Citizens’ Quest for National Reconciliation in Burma/Myanmar. Report of a Citizen Exiles Group The Free Burma Coalition, Executive Summary, Principal Authors Zarni and May Oo, Oktober 2004, hlm. 5. Tanggapan itu dikutip dalam Awani Irewati, Ratna Shofi Inayati dan Jopkie Kurniawan, *Problematisasi Myanmar dalam ASEAN*, the Habibie Center, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²¹ “Country in Crises-Ethnic Groups” pada *Ibid*.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

²⁴ <http://www.comebackalive.com>

bisnis ilegalnya masih berlangsung dengan jaringan peredaran dan pabrik *methamphetamine* yang terbesar mengalir ke wilayah perbatasan. Usaha bisnis ilegal semacam inilah yang banyak memberi “kekuatan” kepada Junta Militer meski berada di bawah tekanan akibat sanksi ekonomi dari negara-negara besar seperti AS dan Eropa.

Bisnis yang dilakukan junta ini juga pernah mendapat perlawanan dari organisasi etnis, seperti Organisasi Independen Kachin (*Kachin Independence Organization*) dan Persatuan Nasional Karen (*Karen National Union*). Tetapi sebagaimana bisa diperkirakan usaha perlawanan mereka ini menjadi sia-sia, karena junta secepatnya “membungkam” mereka. Pemerintah melakukan relokasi etnis-etnis ke lokasi-lokasi etnis lainnya, yang sekiranya bisa menimbulkan potensi konflik antara mereka, karena pengambilalihan lahan, dan perbedaan filosofi bertani.

Di bawah kondisi konflik-konflik yang muncul seperti ini menjadi peluang bagi Junta Militer untuk melakukan tekanan-tekanan kepada mereka seraya menjadikan kondisi ini sebagai pembenaran bagi kelangsungan kekuasaan Junta Militer Myanmar.

Sanksi Internasional dan Eksistensi Tatmadaw

Sebagaimana disinggung di atas bahwa kebalnya Pemerintah Militer Myanmar menghadapi sanksi-sanksi ekonomi, baik dari Amerika Serikat maupun dari Eropa, tidak lain adalah berlangsungnya perdagangan dan bisnis opium dengan Cina maupun Thailand, dan dukungan militer Cina. Kedekatannya dengan Cina ini justru memperkuat Junta Militer tak gentar terhadap bermacam tekanan dan sanksi, baik dari ASEAN maupun dari PBB. Bahkan sejak Junta Militer berkuasa (1988), kekuatan militer Burma meningkat dengan lebih dari 400.000 pasukan. Lalu jenis persenjataan mulai dari yang ringan hingga yang berat juga bertambah dari Cina guna memodernisasi sistem persenjataan Burma.²⁵

²⁵ “Burma and Asian Security”, pada <http://www2.soros.org/burma/CRISIS/secur.html> Beberapa dugaan bahwa pembelian senjata-senjata militer yang canggih dari Cina itu dibeli dengan harga spesial (“*friendship prices*”) dan bahkan dengan cara barter dari hasil penjualan opium.

Dalam konteks Myanmar sebagai anggota ASEAN, “kedekatan” Myanmar dengan Cina bisa direfleksikan sebagai upaya peningkatan strategi militer Cina (*China's People's Liberation Army*) ke selatan guna mencari fasilitas pelabuhan di Teluk Bengal di Asia Selatan dan Samudra Hindia. Pandangan ASEAN ini bisa jadi sebagai faktor penguat bagi pertimbangan diterimanya Myanmar sebagai anggota ASEAN pada Juli 1997.

Alasan mendasar yang dipakai pemerintah Myanmar untuk tidak segera mengadakan reformasi politik ialah adanya kekhawatiran jika reformasi itu dilakukan akan memicu terjadinya kekacauan seperti yang terjadi di Irak. Oleh karena itu, pemerintah berkeyakinan proses demokrasi ini harus diwujudkan secara hati-hati namun tetap pada pendirian tidak akan menyerah pada tekanan internasional.²⁶ Kekhawatiran itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia ketika berkunjung ke Myanmar pada 11 Oktober 2005. Kunjungan yang terlaksana menjelang pertemuan ASEAN di Malaysia (Desember 2005), menyimpulkan reformasi politik Myanmar akan benar-benar dicermati. Pemimpin Junta tampaknya memberi alasan bahwa selama kondisi dalam negeri yang kelompok-kelompok masyarakatnya belum bersatu akan sulit dilakukan pelaksanaan demokrasi. Komitmen mereka ialah menyatukan terlebih dahulu semua segmen dan kelompok masyarakatnya sebelum dilakukan perubahan meski komitmen mereka ini amat sangat diragukan.

Karena yang terjadi di dalam negeri Myanmar sebenarnya bukan hanya perjuangan kelompoknya Aung San Suu Kyi *vis-à-vis* Junta Militer saja, tapi lebih jauh yaitu masalah perlakuan tirani Junta Militer terhadap beberapa kelompok etnis minoritas di dalam negeri Myanmar. Singkat kata, masalah dalam negeri Myanmar bukan hanya persoalan Junta Militer dan pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi (NLD) saja, tapi juga persoalan perjuangan eksistensi kelompok etnis pedalaman agar tidak tercerabut dari bumi Myanmar oleh kekuasaan militer. Lalu masih adakah sisi-sisi ruang kebebasan bagi kehidupan demokrasi di Myanmar?

Yang jelas saat ini persoalan Myanmar tengah diagendakan ke Dewan Keamanan PBB

²⁶ *Kompas*, 12 Oktober 2005

berdasarkan penilaian internasional atas tidak adanya kemajuan reformasi politik dalam negeri Myanmar. Meski ada beberapa negara, termasuk Indonesia yang menyarankan agar kasus Myanmar ini tidak dibawa ke DK PBB melainkan ke Dewan HAM PBB. Dibawanya persoalan Myanmar ke PBB menandakan kasus Myanmar bukan lagi menjadi persoalan dalam negeri Myanmar atau ASEAN saja, tetapi sudah menjadi kasus internasional yang harus diselesaikan di tingkat dunia. Jika demikian halnya, konsistensi Aung San Suu Kyi yang kuat pada perjuangan demokrasi mungkin akan segera melahirkan cahaya baru di negeri Myanmar.

Kesimpulan

Apa yang diharapkan rakyat Myanmar atas dibukanya pintu demokrasi terutama yang diperjuangkan oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi sesungguhnya masih jauh dari jangkauan realisasinya. Begitu kompleksnya pergolakan politik yang terjadi di dalam negeri ini sebenarnya tidak dimulai ketika Junta Militer mengambil alih kekuasaan tahun 1962. Jauh sebelum diperolehnya Kemerdekaan Burma tahun 1948 dari Inggris, lewat upaya Aung San (tokoh nasionalis dan ayah dari Aung San Suu Kyi) dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya upaya mewujudkan persatuan Burma sebenarnya sudah sering diusahakan. Akan tetapi, realisasi menciptakan rasa persatuan di masyarakat Burma saat itu memang sudah terdistorsi oleh strategi kekuatan penjajah —baik Jepang maupun Inggris— yang menggunakan kelompok-kelompok etnis untuk mencari celah menguasai Burma. Sebaliknya, kelompok-kelompok ini juga ada yang bekerja sama dengan salah satu penjajah demi mencapai kemerdekaan, atau bahkan ada yang didorong oleh motivasi untuk menghindari dominasi kelompok etnis yang lebih kuat. Kondisi semacam ini (berjuang secara terpisah-pisah) sedikit banyak memberi andil pada kondisi sulitnya tercipta rasa persatuan masyarakat Myanmar saat ini. Kontrol kekuasaan di bawah Junta Militer awalnya mungkin digunakan untuk “mengendalikan” masyarakat yang terbelah ini. Meski kemudian, junta tidak membuka peluang untuk proses demokrasi seperti Pemilu 1990. Tiadanya kebebasan berorganisasi apalagi berpolitik semakin lama semakin membawa

pemerintah Myanmar ke dalam koridor tirani tanpa batas. Inilah yang kemudian dikecam, ditekan, dan didesak oleh dunia agar Myanmar segera melakukan perubahan lewat reformasi politik.

Cina sebagai negara yang memiliki hubungan “dekat” dengan Myanmar sebaiknya dipertimbangkan oleh PBB sebagai aktor yang harus diajak bicara dalam masalah ini. Karena kepentingan Cina pada Myanmar cukup besar, meski kedekatan mereka itu lebih kepada hubungan bisnis. Pendekatan yang dilakukan Indonesia lewat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Myanmar pada 22 Februari 2007 merupakan langkah positif selama diikuti dengan rumusan target Indonesia yang ingin dicapai dalam kunjungan itu. Penetapan target jangka pendek maupun jangka panjang oleh Indonesia sangat penting sebagai langkah *monitoring* terhadap perkembangan reformasi politik sebagaimana yang diinginkan. Target jangka pendek itu bisa berupa pelepasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumahnya ataupun penyusunan Konstitusi Myanmar. Target jangka panjang bisa berupa pelaksanaan pemilihan umum dan mengakui apa pun hasilnya sebagai bukti terkuat bahwa Myanmar sudah memasuki alam demokrasi.

Daftar Pustaka

- “Aung San Suu Kyi”, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aung_San, diakses pada tanggal 5 Juli 2005
- “Burma and Asian Security”, pada <http://www2.soros.org/burma/CRISIS/secur.html>
- “Burma to fight India militants” pada http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6364735.stm, diakses pada tanggal 21 Februari 2007.
- “Country in Crises-Ethnic Groups” pada <http://www2.soros.org/burma/CRISIS/ethnic.html>
- “Country in Crises-History”, <http://www2.soros.org/burma/CRISIS/democ.html>, diakses pada Agustus 2005.
- “Prime Minister of Myanmar” pada http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Myanmar, diakses pada Agustus 2005.
- “Profil Myanmar”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Burma>, diakses pada tanggal 5 Juli 2005

Anonim. 2005. "U Nu, "Senjata Bukan Penyelesaian Masalah", *Pikiran Rakyat*, 19 April 2005.

<http://www.historyofnations.net/asia.birma.html> diakses tanggal 19 Januari 2007.

Irewati, Awani, *et al.* 2006. *Problematika Myanmar dalam ASEAN*. Jakarta: the Habibie Center.

Kompas, 12 Oktober, 2005.

Kurniawan, Jopkie, dan Irewati, Awani. 2006. "Perjuangan Kehidupan Demokrasi di Negara Myanmar" pada penelitian *Problematika Myanmar dalam ASEAN*. Jakarta: the Habibie Center.

Min, Zin. 2006. "Sorting the Tatmadaw after Ne Win", *The Irrawaddy*, Vol. 11. No. 1, Januari-Februari 2003. <http://www.irrawaddy.org/database/2003/vol.11.1/c-sorting.html>, diakses pada tgl 7 Februari 2006.

Oehlers, Alfred. 2005. Makalah Seminar Sehari. "Recent Developments in Burma", *CSIS*, Jakarta 20 Juli 2005.